

Politik Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Pelarangan Batu Bara sebagai Respons Klaim China di Perairan Natuna

Audrey Sitoresmi

audreysitoresmi@gmail.com

Sejarah klaim China di Natuna

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar kerap kali menimbulkan beberapa ketegangan—terutama di bidang maritim yang menjadi incaran negara lain—karena kekayaan sumber dayanya. Natuna, salah satu wilayah perairan yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia; memiliki sumber daya yang melimpah seperti gas bumi, ikan, dan menjadi jalur lintasan laut internasional. Potensi yang dimiliki Natuna tentunya terlihat sangat menggiurkan bagi beberapa negara lain, seperti halnya China. Keinginan China untuk menguasai Natuna terlihat sejak tahun 1990-an, dan kian meningkat pada tahun 2009. Upaya pertama yang China lakukan untuk memiliki Pulau Natuna dilakukan dengan cara memasukan Natuna pada peta wilayah mereka yang didasari oleh *Nine Dash Line* (sembilan titik garis imajiner) yang menjadi klaim wilayah Natuna menjadi kawasan resmi milik China. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu terjadinya konflik atas batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Negara tirai bambu tersebut. Klaim yang dilakukan sepihak oleh China akhirnya tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia karena *nine dash line* sebenarnya tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan UNCLOS (*United Nations Convention for the Law of the Sea*) tahun 1982. Upaya China untuk menguasai Natuna juga diperkuat dengan adanya aktivitas kapal ilegal di wilayah Natuna yang kemudian berlanjut hingga saat ini (Tifada, 2021).

Konflik antar kedua negara tersebut pun semakin memanas karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal China pada 19 Maret 2016 karena telah mengintervensi perairan Indonesia dan mereka menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna, 8 orang awak kapal dari China tersebut kemudian ditahan oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut kemudian mendapat perhatian bagi masyarakat di Indonesia dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tegas menjaga wilayahnya. Terlebih di dalam UNCLOS 1982 tidak ada konsep "*traditional fishing*", dan apabila negara lain ingin menangkap ikan di wilayah yang bukan negara juga harus memiliki perjanjian bilateral dengan negara yang bersangkutan. Namun, tidak ada kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan China mengenai penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Pada saat itu juga sedang tidak ada sengketa wilayah perairan Natuna antara Indonesia dengan China. Indonesia mengklaim Natuna merupakan wilayah yang masuk ke dalam ZEE, namun juga tumpang tindih dengan klaim *nine dash line* China. Namun Indonesia sendiri tidak pernah mengakui *nine dash line* karena tidak ada dasar hukumnya sesuai dengan UNCLOS 1982, sehingga Indonesia mengakui berdasarkan ZEE (Suryadinata, 2016).

Jumlah pelanggaran wilayah / kapal asing yang masuk di sekitar perairan Natuna

Jumlah pelanggaran wilayah maupun kapal asing yang telah masuk di perairan Natuna:

1. 26 Maret 2013, penangkapan kapal China dengan nomor lambung 58081.
2. 19 Maret 2016, penangkapan kapal China Kway Fey 10078.
3. 27 Mei 2016, penangkapan kapal oleh TNI AL.
4. 17 Juni 2016, penangkapan kapal oleh kapal patroli Indonesia.
5. 10 Desember 2019, kapal China masuk ke wilayah perairan Natuna.
6. 23 Desember 2019, puluhan kapal China kembali memasuki wilayah perairan Natuna.
7. 11 September 2020, TNI menemukan 30 kapal asing milik China dengan kapal coast guard China masuk ke perairan Natuna. Hal tersebut ditangani oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono, ia mengerahkan

tiga Kapal Republik Indonesia (KRI) yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358 (Kompas.com, 2020).

8. 12 Desember 2020, Coast Guard China dengan nomor lambung 5204 masuk ke perairan Natuna dan beralasan sedang berpatroli di area Nine Dash Line yang mereka akui sebagai wilayah milik China (CNBC, 2020).
9. 2 September 2021, kapal Hai Yang Di Zhi sempat berhenti di wilayah perairan Natuna dan kembali pada 3 September 2021.
10. 29 September 2021, kapal riset China Hai Yang Di Zhi 10 yang dioperasikan oleh Guangzhou Marine Geological Survey melakukan aktivitas di laut Natuna Utara yang masuk ke dalam wilayah ZEE dan terpantau melalui Automatic Identification System (AIS) oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
11. 4-22 Oktober 2021, kapal riset China Hai Yang Di Zhi 10 kembali masuk di wilayah perairan Natuna.
12. 13 Oktober 2021, IOJI membuat laporan bahwa kapal survei China Yuan Wang 6 diidentifikasi masuk ke wilayah perairan Natuna dan berhenti kurang lebih selama 42 jam (CNN, 2021).

Kasus penangkapan yang sudah dilakukan per tahun hingga sekarang

Kasus penangkapan kapal dari China yang masuk ke wilayah perairan Natuna pertama kali terjadi pada 26 Maret 2013 (Saat masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono). Indonesia menghentikan kapal memancing dari China dengan nomor lambung 58081, namun kapal tersebut lolos karena adanya intervensi dari penjaga pantai (*coast guard*) dari China. Indonesia dan China menangani kasus tersebut dengan tenang karena kapal patroli dari China (Nanfeng) meminta untuk melepaskan kapal 58081 (Rintonga, 2016).

Pada 19 Maret 2016, kapal memancing tradisional dari China yang bernama Kway Fey 10078 ditangkap oleh TNI AL karena telah mengintervensi perairan Indonesia dan mereka menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna, 8 orang awak kapal dari China tersebut kemudian ditahan oleh Pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kemudian melayangkan protes kepada China dengan kasus pelanggaran masuknya kapal ilegal ke batas laut perairan Indonesia untuk mencuri ikan dan pelanggaran yang dilakukan penjaga pantai China atas intervensinya di perairan Natuna (Haeril, 2016).

China kemudian mengirimkan Menteri Luar Negerinya untuk menyatakan bahwa kapal tersebut sedang melakukan aktivitas biasa dan meminta untuk membebaskan 8 kru kapal yang ditahan. Hal tersebut kemudian mendapat perhatian bagi masyarakat di Indonesia dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tegas menjaga wilayahnya. Terlebih di dalam UNCLOS 1982 tidak ada konsep "*traditional fishing*", dan apabila negara lain ingin menangkap ikan di wilayah yang bukan negara juga harus memiliki perjanjian bilateral dengan negara yang bersangkutan. Namun, tidak ada kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan China mengenai penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Pada 13 April 2016, Kepala Departemen Internasional Partai Komunis China, Song Tao, mengunjungi Presiden Indonesia dan menyelesaikan permasalahan tersebut; dan akan dianggap sebagai salah paham. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian masalah kapal China tersebut, namun Indonesia menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di perairan Natuna akan diselesaikan secara damai dan di masa depan kedua negara akan menghormati teritori perairannya masing-masing (Suryadinata, 2016).

Pada 27 Mei 2016, kapal dari China memasuki wilayah perairan Natuna lagi. Indonesia tidak hanya bersiap dengan penjagaan pantai yang lebih ketat, namun TNI AL juga menjadi lebih tegas untuk menangkap kapal dari China tersebut. Namun, kapal patroli dari China tidak melakukan intervensi. Dan di tahun yang sama pada tanggal 17 Juni, kapal penangkap ikan China kembali ditangkap oleh kapal patroli Indonesia (Suryadinata dan Izzuddin, 2017).

Pada 10 Desember 2019, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menyatakan bahwa kapal-kapal China muncul di perairan dekat Natuna yang masih berlayar di landas kontinen Indonesia hingga 15 Desember. Bakamla kemudian mengeluarkan kapal KM Tanjung Datuk untuk datang ke lokasi dan mengusir kapal dari China tersebut. 9 Desember, Kapal dari China dan petugas Bakamla bertemu dan kapal-kapal dari China menuruti untuk menjauh dari perairan Indonesia. Pada tanggal 23 Desember, terdeteksi puluhan kapal-kapal dari China kembali memasuki perairan ZEE Indonesia. Bakamla kemudian mengerahkan kembali kapal KM Tanjung Datuk untuk mengusir kapal dari China tersebut dan melakukan komunikasi melalui radio agar kapal China segera pergi. Namun kali ini kapal-kapal dari China tidak mau pergi dan menyatakan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam wilayah historis Laut China Selatan (CNN, 2020). Kementrian Luar Negeri Indonesia, kemudian melayangkan nota diplomatik protes kepada China karena kapal miliknya tak hanya melewati batas ZEE milik Indonesia, tetapi juga adanya *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* di Laut Natuna (Sebayang, 2019).

Kapan saja bentuk kunjungan Presiden/Menhan/Menko Polhukam sejak 2017 hingga sekarang

Pada 15 September 2015, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengunjungi pulau Natuna untuk melakukan pengecekan sarana dan prasarana pertahanan negara yang digunakan seperti fasilitas pangkalan udara TNI AU Ranai, Pangkalan TNI Ranai, Komando Distrik Militer (Kodim) 0318/Natuna, dan Batalyon Infanteri 134/TS untuk membuat kebijakan pertahanan negara atas perbatasan pulau terluar Indonesia. Dan pada 16 September 2015, Ryamizard Ryacudu juga meninjau Pos Pengamanan Perbatasan dan Pulau terluar di Pulau Sekatung, serta memberikan pengarahan kepada Prajurit TNI yang berada di pulau tersebut (Kemhan.go.id, 2015).

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kembali ke Natuna dengan beberapa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada 8 Maret 2017. Kunjungan tersebut bertujuan untuk Pencanangan Penetapan Kebijakan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) yang merupakan program akselerasi pembangunan wilayah perbatasan negara secara terpadu yang melibatkan Pemerintah. Perancangan Gerbangdutas Tahun 2017 tersebut dilakukan oleh Menteri Polhukam yang didampingi oleh Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Sumadi; dan juga Gubernur Kepulauan Riau, Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Natuna, dan tokoh masyarakat Kabupaten Natuna (Kemhan.go.id, 2017).

Selain Perencanaan Gerbangdutas, Ryamizard Ryacudu juga melakukan beberapa pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Pulau Natuna, yakni pelebaran Runway Lanud R. Sajad, Ranai agar dapat ditempati dua pesawat tempur. Tak hanya pelebaran Runway Lanud R. Sajad saja, Menteri Pertahanan Indonesia juga membangun pron dan Sarprasa Lanud R. Sajad, Ranai; pada tahun 2017. Dan pada 2018, Mereka merencanakan pembangunan Shelter Siaga Pesawat Tempur dan Sarpras Lanud R. Sajad, Ranai; dan juga pembangunan barak TNI berkapasitas 200 orang (Kemhan.go.id, 2017).

Rabu, 8 Januari 2020, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Natuna yang didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono yang berada di Pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT) Selat Lampa untuk melakukan peninjauan kapal pengawas perikanan yakni Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 359 dan Kapal Republik Indonesia (KRI) Karel Satsuit Tubun

dan memastikan adanya penegakan hukum atas sumber daya alam yang berada di zona ZEE (Ihsanuddin, 2020).

Pada 5 Februari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Natuna bersama dengan Menteri Kesehatan Indonesia, Dr. Terawan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tenang dan percaya pada penanganan kegiatan observasi 238 WNI yang datang dari Wuhan, China yang dilakukan di pangkalan militer, Natuna. Menurutnya, Pulau Natuna merupakan tempat yang tepat dan layak untuk menjadi tempat observasi karena jauh dari pemukiman warga dan didukung oleh infrastruktur dan prajurit yang siap untuk tugas darurat (Laeis, 2020).

Transkrip Video

Catatan Core Indonesia Hasil Evaluasi Terkait Kebijakan Larangan Ekspor CPO, IBF tvOne

Pembawa Berita, Brigita Manohara: Kita lanjutkan gimana kemudian catatan core hasil evaluasinya selama kebijakan ini diterapkan sudah 4 komentar.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal: Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Sahat dan juga Pak Herman itu juga yang menjadi evaluasi kami di awal. Kalau kita lihat, kan naik harga itu yang kelihatan signifikan sekali sejak tahun lalu, terutama di Kuartal keempat. Naik Harga nah pada saat itu, sebetulnya kalau kita melihat, pertama tadi sampaikan Pak Herman juga sebagian besar kan pasar kita memang ekspor, jadi ketika harga naik kemudian harga minyak goreng ya merangkak naik gelap pada setelah itu. Kemudian pemerintah merespon di bulan Januari dengan beberapa kebijakannya, jadi DMO HET dengan subsidi itu ternyata sebetulnya kalau kita melihat dan pada saat itu yang menjadi masalah seperti yang disampaikan Pak Sahat juga, itu bukan lebih disuplai tapi didistribusi. Supply sebetulnya cukup, memang ada, ketika ada kenaikan harga memang ada cenderung peningkatan dari sisi ekspor juga. Tapi bukan berarti di dalam negeri itu kurang. Jadi yang menjadi koreksi sebetulnya lebih ke distribusinya, ya channel distribusinya. Sehingga ketika direspon dengan kebijakan yang juga sampai kepada sisi supply ini jadi merambah kemana-mana. Termasuk sebelum yang sekarang juga ke industri-industri turunan yang tidak ada hubungannya sama minyak goreng itu. Sebelumnya ya jadi industri oleokimia, biodiesel gitu ya stereo semuanya kena. Jadi istilahnya yang kena getahnya mau nembak tikus dipakai granat atau pakai bom, kena semua gitu. Jadi itu sejak awal memang desain kebijakan itu tidak melihat akar masalahnya itu ada dimana. Kemudian makin makin kesini kemudian memang ada masalah distribusi kemudian muncul isu dari sisi mafia itu juga. Memang sudah mulai ada semacam upaya ke sana gitu. Tapi terakhir-terakhir karena kemudian juga harga minyak goreng tidak kunjung turun. Dan akhirnya kemudian yang yang kemasan subsidiya dilepas curah, karena kemasan tidak efektif kita bisa prediksi juga sebelum berubah kebijakan itu ketika hanya diproduksi. Apa di targetkan hanya pada curah maka permasalahan yang terjadi ke sebelumnya pada minyak goreng kemasan yang juga tidak turut itu akan terjadi dan kelangkaan juga akan terjadi. Yang sebelumnya dikemasannya, jadi karena permasalahan itu tadi didistribusi. Ketika terakhir ya sampai kepada larangan ekspor CPO ya dan juga RBD Olein ini sebetulnya juga jadinya masih sampai ke hulu juga. Pendekatannya memang supply daripada CPO itu kalau dari rantai suplai yang diterbitkan itu 94% CPO itu masuknya ke refine oil. Kemudian dari refine oil itu, 80% RBD Palm olein, 20% yang strain. Jadi artinya kalau total produksi CPO sekitar 75% itu yang mengarah kepada industri minyak Ada 25% sebetulnya oke yang lain-lain. Jadi ketika ada larangan CPO yang memang ini sekarang sudah boleh, tapi efektivitas yang 75% ini menjadi pertanyaan ketika ini juga belum turun. Nah jadi ini kalau berlama-lama akan berpengaruh. Satu, yang kalau kita melihat secara macro, yang saya khawatirkan bukan hanya dari sisi trade. Ya kalau trade itu saya rasa masih masih bisa kita

redam dampaknya. Sebagaimana juga kalau kita lihat kasus larangan batubara di bulan Januari reflektornya tidak terlalu besar. Tapi yang kita khawatirkan adalah, kalau udah makin lama ke petani, kemudian ke pegawai, dan yang saya khawatir lebih jauh juga adalah iklim investasinya. Kalau sampai iklim investasinya itu juga mendorong, akhirnya orang investor yang tadinya menanamkan di Indonesia kemudian hengkang atau pindah, kita rugi, yang lainnya jadi untung. Mungkin Malaysia juga gitu ya. Nah ini dampaknya bisa jadi lebih jangka panjang. Padahal CPO adalah komoditas andalan kita satu yang dia punya multiplier effect yang begitu luas. Jadi itu yang saya khawatirkan, kalau kemudian ini berkepanjangan, saya rasa memang efeknya bisa jadi jadi Efek domino.

Pembawa Berita, Brigita Manohara: Pak Bayu, ini concernnya akhirnya jadi semakin dalam terhadap minyak goreng. Ini ada carut-marut yang tadi kalau kita dengarkan dari hulu ke hilir kayaknya kok masalah semua gitu ya. Sepengalaman Pak Bayu, dari catatan dan apa yang sudah dilakukan evaluasi dari Pak Bayu, gimana?

Wakil Menteri Perdagangan Periode 2011-2014, Bayu Krisnamurthi: Sudahlah, kalau semuanya masalah hubungan, kita menjadi negara nomor satu terbesar di dunia untuk produksi, maupun negara nomor satu ekspor. Dan itu tidak dengan fasilitas pemerintah, mereka bisa. Tentu ada dalam perjalanannya, tetapi betul-betul karena daya saing dari sawit kita itu yang pertama menurut saya, harus kita kita apa sadari. Kalau saya sih ingin mengajak, justru kita harusnya bangga sama sawit ini luar biasa; local content nya begitu tinggi dan hampir hal yang kemudian membuat kita bisa melihat ini nanti akan dimiliki oleh negara lain. Mungkin selain tetangga kita, Malaysia, itu yang pertama. Yang kedua, saya kok sangat yakin ini, tapi ini keyakinan saya, tapi saya yakin larangan ekspor ini sementara, sebentar ya. Bukan sesuatu yang menjadi, apa namanya kebijakan yang permanen. Saya sangat yakin para pemimpin kita, saya kira sangat menyadari betapa penting dan strategisnya sawit. Oleh sebab itu, mungkin lebih produktif jika kita berusaha untuk berkonsentrasi mencari cara memenuhi apa yang diarahkan bahwa presiden; gimana caranya supaya untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah, mohon maaf kalau Pak Sahat, Pak Herman beli minyak goreng yang harganya Rp25.000 keatas ya silahkan saja Tapi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah itulah yang kita usahakan untuk bisa mendapatkan minyak goreng 14.000. Kemudian juga perbedaan harga antara minyak goreng yang untuk kelompok masyarakat ini dengan yang gini itu, harus bisa dihindari sebagai ajang spekulasi betul-betul tersasar untuk mereka yang memang membutuhkan. Kalau dua itu bisa dipenuhi, yang pertama, minyak goreng curah untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah bahkan kalau tidak salah sudah sampai disebutkan *pure and mirpure* target sekali itu terpenuhi Rp14.000. Tidak ada antrian, sebagai cerminan untuk tidak ada kelangkaan sebenarnya dan juga tidak kemudian menimbulkan spekulasi yang kemudian dijual lagi dan lain-lain. Rasanya sih tidak ada alasan untuk ekspor tidak dibuka lagi, karena ekspor itu menguntungkan bagi kita kok. Nah sekarang bagaimana caranya, saya setuju tadi dengan beberapa pengamatan bahwa mungkin kalau kita belajar dari proses yang kita lewati dalam tiga bulan terakhir, tampaknya kita memang terlalu berat di sisi supply pendekatan polsenya. Jadi harus dirubah menjadi pendekatan polose yang datang dari sisi demand. Misalnya, bisa nggak kita pastikan kalau ini kelompok masyarakat ini mereka berapa sih butuh minyak gorengnya, paling sehari seliter satu keluarga dan mereka tidak akan beli banyak. Kenapa? Karena gak punya cash. Pasti mereka belinya 14.000 itu satu hari dipakai buat masak. Setelah itu Mungkin besok beli lagi gitu, jadi dia bisa beli 1 liter pagi itu dan tidak bisa beli lagi. Karena kalau dia bisa beli lagi, nanti ada yang modalin tuh naik kemudian nanti ada penampung. Nah ini sebenarnya bikin masalah di belakang hari, kemudian kalau udah usaha mikro yang gorengan yang segala macam yang dipikul mungkin 2liter 3liter maksimum sehari. Kenapa kok saya bilang 3liter, kalau dengan 14.000 saja 3liter tuh ambil Rp50.000

modal Rp50.000 tukang gorengan ke pasar sekali. Jadi pasti dia akan banyak juga belinya nah tapi besok dia perlu beli ada lagi. Setuju kita harus betul-betul memastikan sistem distribusi sampai kerikil sampai kepada verifikasi orang-perorang yang beli. Dan itu sebenarnya Indonesia adalah salah satu *Champion* nya melakukan itu. Gampangnya Gojek, Tokopedia pakai teknologi dong, pakai aplikasi yang memungkinkan mereka kemudian hanya sekedar dia klik. Katakanlah di scan KTP ini sudah pada hari itu saat di scan KTP nya udah gak bisa beli lagi. Sekali beli itu aja, tapi besok datang lagi bisa ada lagi dan seterusnya. Dan itu Rp14.000 yang juga harus kita perhatikan adalah kalau nanti ini dibuka ekspornya yang 14.000 di masyarakat berpendapatan rendah itu enggak boleh naik, harus tetap terjaga. Sekarang misalnya karena gara-gara dibanjiri ini supply banyak ya kan, dan maka harga mulai menurun. Tadi katanya tapi kalau itu yang dipakai pada saat nanti ekspornya dibuka, supply berkurang lagi agar pasti naik. Jadi menurut saya yang kita bangun dan ini mohon restu Pak Herman di DPR. Tentunya saya kira harus kita sarankan pada pemerintah untuk membangun sebuah bisnis model baru di perminyak gorengan Indonesia. Ibaratnya Pak Sahat, kalau anda mau bisnis minyak goreng di Indonesia maka anda harus penuh ini dulu nih yang 14 ribu ini. Yaitu mungkin 10%, 15% dari your bisnis, 90% nya silahkan market mekanisme tapi you have your obligation. Untuk itu, nah kita tidak usah bilang demo. Tapi intinya setiap kegiatan usaha minyak goreng akan punya model demikian. Menurut saya ini bisa dan pakai teknologi kita sekarang udah bisa mengelola 10.000 bahkan 1jt perdata itu bisa terkelola dengan baik, dengan dengan rapi dan enggak ada masalah gitu. Bisanya juga apakah di ritel kita punya, punya Alfamart itu sudah Rp18.000, Indomaret sudah kira-kira 15000; dua itu saja itu sudah Rp33000, Rp5.000 itu sudah di seluruh Indonesia tercover pada sisi retail. Mungkin tidak usah pakai itu, saya kasi contoh saja ada dan bisa. Nah kalau kita mau rasanya ini sesuai ada prospek yang sangat jelas dan kuat untuk bisa pada saatnya Presiden akan melihat, oh ya rakyat yang kurang mampu sudah terpenuhi kebutuhannya dan tidak ada alasan untuk menahan ekspor; karena Indonesia ingin ekspor.

Pembawa Berita, Brigita Manohara: Kita bukan tidak ingin export, ada model bisnis yang kemudian masih dimodifikasi supaya kalau kita bicara tentang teknologi bagaimana kemudian mensiasati yang masih belum terjangkau dengan teknologi ini. Termasuk juga data yang address itu tadi supaya benar-benar tepat sasaran agar tidak terus bertambah kebutuhan subsidiya. Tadi yang kalau pas saat saya boleh garisbawahi disampaikan sesaat lagi kita akan lanjutkan Tetaplah bersama kami.

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=7IJpv-dVW0E>

Transkrip video Pro Kontra Larangan Ekspor Batu bara RI

Larangan bagi ekspor batubara oleh pemerintah RI mendapat penolakan nampaknya dari asosiasi pengusaha. Sebagai salah satu negara pengekspor batubara terbesar di dunia, larangan ini tentu berdampak pada kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan pembeli dari luar negeri. Namun dari sisi pemerintah, larangan ekspor batubara dikeluarkan lantaran perusahaan listrik negara ;PLN; tengah mengalami defisit batubara yang mengancam ketersediaan pasokan listrik nasional. Pro-kontra larangan ekspor batubara kami bahas pagi ini dengan Hendra Sinadia, direktur eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI.

Pembawa Berita: Selamat pagi pak Hendra apa kabar?

Hendra Sinadia: Hai kabar Baik.

Pembawa Berita: Ya pak Hendra kita bahas satu-satu ya, ini beberapa poin salah satunya terkait dengan nama baik RI sebagai pengekspor batubara terbesar di dunia. Kemudian terkait dengan pasokan listrik nasional, DMO. Dan juga bagaimana kelanjutan diri diskusi akan dilakukan dengan pemerintah, kita bahas satu persatu lebih dahulu. Pak Hendra saat ini sebetulnya bagaimana sikap dari asosiasi pengusaha batubara terhadap keputusan pemerintah melarang ekspor sampai 31 Januari?

Hendra Sinadia: Ya terima kasih. Yang pertama waktu larangan ekspor sementara itu dikeluarkan, kami bereaksi mengajukan keberatan karena pada dasarnya kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Dimana kami lihat keputusan tersebut diambil tanggal 31 Desember setelah mendapatkan surat dari PLN, tanggal 31 Desember di hari yang sama memang waktunya sangat mepet sekali. Sehingga kita melakukan keberatan untuk disampaikan ke pemerintah agar ditinjau kembali, perlu klarifikasi dulu data-datanya seperti apa. Nah setelah itu pemerintah merespon tanggal 1 Januari itu, hari-hari tahun baru yang hari libur ya, itu luar biasa kita meeting intensif dengan pemerintah dengan Pak Dirjen Minerba juga dengan Pak Lutfi, Menteri Perdagangan itu berapa kali dalam satu hari dan bahkan misinya dilanjutkan di tanggal 2 Januari. Nah dari pertemuan-pertemuan tersebut kami memang memahami bahwa kondisi kelangkaan pasokan batubara di beberapa PLTU seperti yang disampaikan PLN. Oleh karena itu kita memang posisinya saat ini adalah bagaimana bersama-sama membantu pemerintah *all out*, ya seluruh perusahaan untuk yang terdekat ini dalam hitungan hari bagaimana kita memastikan kelangkaan pasokan itu bisa terjamin dulu. Setelah itu tercapai, tentu kita berharap pemerintah secara bertahap bisa memberikan lagi kemudahan untuk ekspor. Jadi Kita perceivers adalah fokus bersama-sama pasokan ke PLN kalau hitungan hari bisa terjaga. Setelah itu kita juga memastikan ekspor bisa berjalan terkait domestic market obligation kewajiban untuk memenuhi pasokan batubara nasional terlebih dahulu. Bagaimana sebetulnya apakah kewajiban tersebut dipenuhi dengan baik dengan sesama oleh para pengusaha sektor batubara. Oh iya, besok secara umum ya sebagian perusahaan itu mematuhi kewajibannya dengan baik. Jadi kalau kita lihat kelangkaan pasokan ini akan terjadi tidak di semua pembangkit yang ada, penyakit pembangkit yang disampaikan oleh PLN, yang stoknya mulai menipis. Tapi tidak semua di banyak pembangkit lain-lain itu memancarkan pasokan

meskipun harga komoditas pernah mencapai rekor tertinggi itu tetap terjadi. Ya Jadi kami melihat bahwa sebagian perusahaan melaksanakan kewajibannya. Namun ada juga yang mungkin tidak melaksanakan kewajibannya, anggotanya juga sangat terbatas yang sudah lebih dari 80 perusahaan yang berkontribusi lebih dari 70% dari produsen diluar sana ada ribuan desain. Namun disatu sisi juga kalau kita melihat permasalahan pasokan batubara sejak dulu, juga ada banyak perusahaan yang kualitas batubaranya tidak bisa diserap oleh pasar. Nah banyak hal ini yang harus dibenahi. Oleh karena itu Pak Pandu Sjahrir, ketua kami dalam rapat dengan Menteri perdagangan dan ESDM tanggal 1 Januari itu 7 dakwah kita selesaikan dulu. Tetapi kita perlu menyelesaikan solusi permanen ini supaya tidak terjadi lagi. Karena ini kan bukan satu dua kali, dimana terjadi kelonjakan harga batubara yang signifikan mulai kedengaran PLN berteriak ada keluhan impor sama ekspor. Di sisi lain saat batubara sedang naik, kan itu kami dari pelaku usaha kesulitan untuk bisa memasok ke PLN untuk memenuhi kebutuhan DMO. Jadi kami dari APBI yg fokus saat ini adalah memastikan permintaan pusat terjamin, tapi di sisi lain juga kami minta solusi permanen ini bisa dituntaskan juga dengan cepat agar jangan sampai terlewatkan.

Pembawa Berita: Oke baik jadi ada kekhawatiran terkait dengan pemenuhan pasokan tapi juga dilihat dari harga komoditas sendiri ya. Oke baik, Pak Hendra, ini kita bahas dari segi bisnis ya ini, ekspor batubara RI kita sebagai negara dengan batubara terbesar di dunia, begitu ini sampai tanggal 31 Januari. Jika kemudian ekspor batubara tersebut dilarang begitu, bagaimana kemudian dampaknya akan dirasakan oleh para pengusaha kerugiannya tersebut?

Hendra Sinadia: Tentu saja banyak mitra-mitra kami telah melampaui menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke kamu ya. Dan kami akan secara bertahap nanti akan meladeni satu persatu dengan beberapa mitra tetap kami. Tapi kami juga mendengar ya ini kami sedang ada pertemuan saat ini dengan Pak Menteri perdagangan, beliau menyampaikan banyak mendapatkan telepon dari negara-negara sahabat, negara-negara tujuan ekspor batubara Indonesia, dan beliau meyakinkan bahwa Indonesia committed untuk tetap menjadi eksportir terpercaya. Namun Indonesia ingin menyelesaikan permasalahan yang paling urgent seperti yang disampaikan juga oleh Pak Presiden dalam sambutannya kemarin adalah the domestic market, itu adalah prioritas utama kami bekerja keras, all out dan bahkan banyak perusahaan yang apa namanya, tidak melebihi kewajiban DMO nya. Tapi mereka juga ikut ya pokoknya kita yang ini. Namun kami juga melihat ya saya ini ada kendala pengapalannya, jadi tidak mudah memang ya. Barang juga udah siap tapi kapalnya juga untuk pengiriman juga, tidak mudah untuk mendapatkan kapal. Jadi kita sama-sama termasuk melibatkan Kementerian Perhubungan untuk bisa menuntaskan masalah ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tapi sudah ada pernyataan juga dari Presiden akan menindak tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan untuk larangan ekspor sampai tanggal 31 Januari.

Pembawa Berita: Pak Hendra sebetulnya nanti apa solusi yang akan dibawa oleh APBI pada pertemuan yang dilakukan dengan Menteri perdagangan hari ini?

Hendra Sinadia: Akhir-akhir ini sedang berjalan ya, kita dalam pertemuan berapa hari terakhir secara intensif intensif dari tanggal 1 itu marathon meeting, tanggal 2 itu kita breakdown semua data-data realisasi atau Rencana pengiriman batubara ke PLN itu sampai detail termasuk kapalnya, ton HPnya, kapan pengirimannya atau Permata lainnya itu di breakdown. Jadi kita fokus itu dulu tentunya. Namun disisi lain tentu kita juga ingin memastikan perusahaan-perusahaan ini melaksanakan kewajibannya segera. Pak menteri juga sudah menyampaikan data-data, mungkin sudah banyak beredar ya perusahaan-perusahaan yang mungkin per-Oktober yang pasti itu dapat per-oktober, ada perusahaan yang mungkin jadi PMO-nya masih masih kurang. Karena solusi tuntas ini kita juga perlukan.

Pembawa Berita: Setelah disampaikan bahwa banyak juga perusahaan yang ingin menjual dalam negeri, tapi kualitas batubaranya itu tidak bisa diserap oleh pasar mini, harus domestic, artinya pasar domestik atau pasar ekspor?

Hendra Sinadia: Pasar dalam negeri ya oke 5% BNE, tapi kan banyak ya mungkin sebagian besar perusahaan yang kualitas batubaranya ini tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh domestik. Nah sementara mereka pengen menjual. Nah itu bagaimana penyebaran masalah yang memang sangat klastik dan saya kira juga pemerintah enggak mudah ya mencari formula yang benar-benar bisa memberikan win-win solution bagi semua. Saya kira pemerintah juga dalam kondisi yang apa namanya, tidak mudah. Tapi disisi lain memang pemerintah harus benar-benar menjaga kekompakan domestik dan ekspor ini bisa berjalan. Jadi ini sangat kritikal, tapi kami melihat dengan upaya pemerintah yang sangat koordinatif ya dalam beberapa hari terakhir ini nampaknya ada titik terang patokan ke PLN ini bisa terlaksana, dengan dengan harapan ketersediaan shipment atau shipping ini juga bisa didukung, dan juga ekspor kita mulai pelan-pelan. Tetapi disisi lain, kami sudah setuju penegakan hukum, ya ini harus dijalankan bersamaan.

Pembawa Berita: Baik kondisinya tidak mudah bagi pemerintah. Apakah kemudian ini mudah bagi pengusaha?

Hendra Sinadia: Tentu ini sulit, kerugian pasti depan mata ya khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang tinggi mengekspor, ya kapal-kapal yang tidak bisa berlayar ini kan tentu ada biaya yang tidak kecil. itu bisa sampai 40 ribu dollar perhari. Jadi cukup besar ya biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan-perusahaan disaat ini dan yang penting juga adalah bagaimana kepercayaan kita di foreign buyers. Dan sudah banyak berita-berita ya tadi di cerita berita di media, di luar negeri mengenai kekhawatiran dari negara Tiongkok mengenai Apa dampak ini tapi kan ini kita Yakin pemerintah juga sangat memahami, tentu bahwa dari isu ini juga cukup cukup berpengaruh terhadap pasar Ekspor kita sebagai komoditas andalannya batubara. Tapi disisi lain memang kerangka deskripsinya adalah hal yang prioritas, jadi kita serahkan ke pemerintah bagaimana skema yang terbaiknya kita diambil.

Pembawa Berita: Sampai saat ini kalau bicara soal permintaan dari foreign buyer's kepada batu bara asal Indonesia, sejauh ini apakah trennya terus meningkat atau bagaimana sebetulnya memperoleh, memframing permintaan pasokan batubara dari Indonesia ke pasar ekspor?

Hendra Sinadia: Ini menarik ya kalau kita lihat dalam dua tahun terakhir ini isu perubahan iklim sangat mempengaruhi terhadap Demand market. Ya negatif, persepsi negatif. Tapi kalau kita lihat data-data impor ya, impor dari Tiongkok itu terus meningkat Ekspor kita ke Tiongkok. Dan juga terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir ini. India juga, tetapi India di 2020 disaat itu kita berkurang sekali. Tapi di 2021 ada peningkatan demikian pula negara-negara Asia Tenggara. Trend terus meningkat dan juga di Asia timur, sehingga kami optimis memang di 2022 ini jika hambatan, jika kita bisa melaksanakan apa namanya, pasokan dalam negeri bisa aman dan ekspor bisa dilanjutkan lagi. Kita optimis demand di 2022 ini cukup muat, makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM itu mematok target produksi batubara di 2022 ini diangkat sekitar sekitar 625jt kalau tidak salah ya. Cukup tinggi dan cukup optimis.

Pembawa Berita: Baik Pak Hendra kita nantikan ya, bagaimana hasil pertemuan antara asosiasi pengusaha batubara, juga pihak-pihak terkait dengan pemerintah. Pada hari ini, mengenai larangan ekspor batubara sampai 31 Januari ini, semoga ditemukan solusi yang menguntungkan untuk semua pihak, pasokkan listrik nasional terjaga. Begitupun juga dari segi bisnis bagi pengusaha. Terima kasih Pak Hendra Sinadia, direktur eksekutif APBI sudah bergabung bersama kami disini Indonesia tadi pagi ini saat pagi, Pak Hendra Salam sehat.

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Ljt7Zb7YpjY>

Pelarangan Ekspor Batu Bara

Sektor pertambangan di Indonesia, terutama batubara menjadi sektor yang memiliki banyak potensi jika dimanfaatkan dengan baik. Di Indonesia, sektor industri dan minerba (Mineral dan Batubara) menjadi penyumbang GDP terbesar. Namun, Pemerintah Indonesia saat ini merasa dirugikan apabila mengekspor barang mentah; dianggap membuang kekayaan mentahnya sendiri tanpa diolah terlebih dahulu. Selain itu, Kementerian ESDM menyatakan bahwa pemerintah menugaskan perusahaan batubara untuk mengirimkan 5,1 jt ton batubara kepada PLN, namun yang terkirim hanya 35 ribu ton saja. Tindakan yang dianggap tidak serius itu pun kemudian menjadi pemicu munculnya kebijakan larangan ekspor (Setiawan, 2022). Hal tersebut kemudian membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat regulasi baru mengenai sumber daya alam Indonesia agar tidak habis begitu saja dan agar produsen batubara lebih serius berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO). Kebijakan mengenai larangan ekspor batubara berlaku selama satu bulan, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2022.

Irwandy Arif, staff khusus ESDM, pada 20 Januari 2022 menyatakan bahwa 139 perusahaan batubara telah meratifikasi Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga mereka sudah dapat melakukan kegiatan ekspor. Apabila perusahaan batubara di Indonesia tidak mematuhi DMO, mereka akan diberikan sanksi dan denda sesiaio dengan ketentuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni Keputusan Menteri No. 13/2022 (Guitarra, 2022). Dan pada 1 Februari 2022, kebijakan larangan ekspor batubara berakhir. Alasan dibukanya kembali ekspor batubara kepada seluruh produsen; karena persediaan batu bara yang dikirimkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN sudah membaik dan stabil memenuhi kewajiban DMO (Guitarra, 2022).

Ketidaksetujuan dengan OBOR

OBOR atau *One Belt One Road*, merupakan proyek dari China yang diprakarsai oleh Xi Jinping pada 2013 untuk menghubungkan negara-negara melalui jalur sutra. OBOR berhasil menggandeng 65 negara di Eropa, Afrika, dan Asia; Indonesia menjadi salah satunya. Seiring dengan berjalannya OBOR dan pembangunannya, beberapa negara diketahui gagal dan merugi karena proyek OBOR kurang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan di negaranya. Pembangunan proyek OBOR mulanya menggunakan dana dari simpanan devisa milik China yang kemudian akan dipinjamkan kepada negara-negara berkembang yang kemudian akan digunakan untuk membangun infrastruktur di negara tersebut dengan melibatkan perusahaan China. Hal tersebut kemudian akan mewujudkan strategi internasional China yakni "*China's dream*" dan "*The Great Revival of the Chinese Nation*", karena OBOR menjadi penghubung berhasilnya Sustainable Development Goals yang diusung PBB (BBC, 2012).

Indonesia sendiri memiliki 13 proyek dengan OBOR yang akan dibangun di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa. Salah satunya adalah pembangunan *New Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo (Environmental Justice Atlas, 2018) yang mendapatkan investasi sebesar 700 juta Dollar AS. Dalam proses pembangunannya, *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) ternyata belum ada kesepakatan yang jelas antara masyarakat dan PT Pembangunan Permukiman (PP). Masyarakat sekitar juga dipaksa untuk menyerahkan

lahannya (pemukiman, perkebunan, pertanian, dan peternakan milik warga) dengan alasan PT PP akan memberikan ganti rugi yang tidak diketahui nominalnya (JDA Press, 2017). Hal tersebut kemudian menarik perhatian publik dan tak sedikit dari mereka yang menyuarakan ketidaksetujuannya atas proyek yang dibangun OBOR atas pembangunan New Yogyakarta International Airport.

Salah satunya adalah aksi yang diselenggarakan di Kota Malang. Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang berasal dari berbagai Universitas di Malang, Komite Aksi Kamisan Malang, Gusdurian, Gubuk Tulis, Kalimetro, Intrans Institute, dan aktivis pers mahasiswa Malang menggelar aksi protesnya "Stop NYIA, Soidaritas dari Malang untuk Kulon Progo" (Mansur, 2018). Dapat dikatakan bahwa mekanisme investasi OBOR dalam pembangunan New Yogyakarta International Airport masih belum mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dengan perekonomian yang relatif rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Arisanto, P. T. (2019). IMPLEMENTASI DEVELOPMENTAL STATE INDIA DALAM MENGHADAPI PATEN TRIPS DAN STRATEGI RANBAXY LAB. DALAM PERSAINGAN GLOBAL. *TransBorders: International Relations Journal*, 3(1), 43-50.

Arisanto, P. T., & Pratiwi, T. S. (2020). Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi Di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 69-86.

Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163-183.

BBC. 2012. Full text: China's New Party Chief Xi Jinping's Speech.

Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-20338586>

CNBC Indonesia. 2020. Parah! Kapal China Masuk RI, Klaim Natuna, Diusir Tak Mau.

Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200914062050-4-186492/parah-kapal-china-masuk-ri-klaim-natuna-diusir-tak-mau>

CNN Indonesia. 2020. Kronologi Kapal Nelayan China Terobos Perairan Dekat Natuna. Diakses

[https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103124754-106-](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103124754-106-462119/kronologi-kapal-nelayan-china-terobos-perairan-dekat-natuna)

[462119/kronologi-kapal-nelayan-china-terobos-perairan-dekat-natuna](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103124754-106-462119/kronologi-kapal-nelayan-china-terobos-perairan-dekat-natuna)

CNN Indonesia. 2021. Kapal Riset China Terdeteksi Masih Berkeliaran di Laut Natuna.

Diakses Melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024151842-711599/kapal-riset-china-terdeteksi-masih-berkeliaran-di-laut-natuna>

Environmental Justice Atlas. 2018. New Yogyakarta International Airport (NYIA), Java, Indonesia.

Diakses melalui <https://ejatlas.org/conflict/international-airport-on-the-kulon-progo-coast-indonesia>

Guitarra, Pratama. 2022. Berita Hari Ini, Larangan Ekspor Batu Bara Tetap Berlanjut?. CNBC Indonesia.

Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220131091254-4-311682/berakhir-hari-ini-larangan-ekspor-batu-bara-tetap-berlanjut>

Guitarra, Pratama. 2022. Gong Xi Fa Cai Larangan Ekspor Batu Bara Sudah Dicabut. CNBC Indonesia.

Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220201095817-4-312008/gong-xi-fa-cai-larangan-ekspor-batu-bara-sudah-dicabut#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Bak%20kado,pada%201%20Februari%202022%20ini>.

Haeril Halim, Anggi M. Lubis dan Stefani Ribka. 2016. RI confronts China on fishing. The Jakarta Post. Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/21/ri-confronts-china-fishing.html>.

Ihsanuddin. 2020. Fakta Kunjungan Jokowi ke Natuna, Masuk dalam Teritorial NKRI hingga Tidak Bisa Ditawar. Kompas.com.

Diakses Melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/01/09/07045311/fakta-kunjungan-jokowi-ke-natuna-masuk-dalam-teritorial-nkri-hingga-tidak?page=all>

JDA Press. 2017. Panggilan Solidaritas: Mendukung Perjuangan Petani Kulon Progo Melawan Bandara dan Kota Bandara. Yogyakarta. pp.6-7.

Iswardhana, Muhammad Ridha; Hapsari Maharani. (2016). *Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Dumping Barang WTO: Studi Kasus Sengketa Kertas Indonesia-Korea Selatan*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.

Iswardhana, Muhammad Ridha; Salam, Usmar. (2015). *Strategi Thailand Dalam Recovery Pariwisata Terhadap Peningkatan International Tourist Arrivals (ITA) Pasca Kerusakan Politik Tahun 2010-2013*. Tesis Universitas Gadjah Mada.

- Iswardhana, M. R. (2018). Quo Vadis International Trade: Indonesian Diplomacy Strategy Regarding Settlement WTO with South Korea. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 113–124.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) as the Future of Diplomacy for World Solidarity to Overcome the COVID-19 Pandemic. *Global South Review*, 2(1), 25-33.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Sleman: PT Kanisius. 133-136.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Cyber Diplomacy And Protection Measures Against Threats Of Information Communication Technology In Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(2), 345-351.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 4(1), 1-13.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Widiono Suyud. (2021). *Diplomasi Siber Dan Teknologi Mobile Pada Multidisiplin*. Padang: Partnership on Action for Community Education (PACE). 3-10.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). *DEFENDONESIA*, 6(1), 5-6.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*. Yogyakarta: AIHII Press. 1-12.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Arisanto, Puguh Toko. (2022). Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(14), No.2.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Winanti, P., & Nurhayati, R. (2022). Promoting Education and Training as Efforts to Improve Human Resources in African Developing Countries. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(2), 767-782. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3698>.

- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1081-1088.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Attamimi, Attina Maulidia Selma. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(2), 109-120.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H. ., Wibawa, A. ., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK MENYONGSONG PEMILU 2024 TERHADAP GENERASI Z DI SMAN 4 YOGYAKARTA. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6–10.
- Mahmudah, Husnatul; Suhariyanto, Didik; Fajrina, Rahma Melisha; Marwenny, Elwidarifa; Husnita, Liza; Nazmi, Ranti; Iswardhana, Muhammad Ridha; Wahyuni, Sry; Citra, Helfira. (2023). *Pengantar Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 91-103.
- Mansur, Muntaha. 2018. Solidaritas Untuk Petani Kulon Progo Yogyakarta. Terakota.
Diakses melalui <https://www.terakota.id/solidaritas-untuk-petani-kulon-progo-yogyakarta/>
- Nurmamurti, R. A., Navila, S. F., Budi, E. S., Amanda, A. C., & Kholifah, D. S. (2022). Kebijakan Amerika Serikat dalam Menjaga Eksistensi Pasar Global Melalui Perusahaan Coca-Cola (Kapitalisme : Coca Colonization). *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1.925>.
- Pratiwi, T. S. (2018). Understanding the Movement of Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Againts Land Conflict with PT. Asiatic Persada in Jambi Through Social Movement Theory. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.859>
- Pratiwi, T. S. (2020). An Analysis of Humanitarian Military Intervention in Nigeria: Focus on Saving Victims or Defeating Boko Haram? *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.41>.
- Pratiwi, T. S., Aliya Hamida, Galih Antonius Ola Lewoema, & Ahmed Varrel Alkahfi Mauza. (2022). ANALISIS KAMPANYE DONASI ORGANISASI COME BACK ALIVE DALAM UPAYA MEMPRODUKSI KEAMANAN DI PERANG RUSIA-UKRAINA

- TAHUN 2022. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 4(2), 1–15.
<https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.104>.
- Purnama, Ari Bayu; Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Kalimantan Border Issues And Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 105-107.
- Rizky, L. (2015). Bisnis Sosial: Sintesis Muhammad Yunus untuk Menggerakkan Kapitalisme di Bangladesh. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 23–34.
<https://doi.org/10.18196/hi.2015.0063.23-34>.
- Rizky, L., & Bin Supriyadi, H. S. K. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 4(2), 15–28.
<https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 177–185.
- Rizky, L., Salampessy, M. A. S., & Achdyana, I. (2022a). Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in SoutheastAsian Countries. *JASSP*, 2(1), 12–20.
<https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.50>.
- Setiawan, Verda Nano. 2022. ESDM Ungkap Alasan di Balik Kebijakan LaranganEkspor Batu Bara. *Katadata*. Diakses melalui <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/61fa3817e9b15/esdm-ungkap-alasan-di-balik-kebijakan-larangan-ekspor-batu-bara>
- Siagian, M., & Pratiwi, T. (2018). Narcoterrorism in Afghanistan. *Jurnal ICMES*, 2(2), 158-178.
- Tanaem, E., & Arisanto, P. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(2), 120 - 139.
- Wibawa, A. and Arisanto, P. T. (2019) “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao”, *Nation*

State: Journal of International Studies, 2(2), pp. 105-122. doi:
10.24076/NSJIS.2019v2i2.152.